

Persepsi Politik Perempuan Kalampangan Terhadap Kerusakan Gambut dan Eksklusi Partisipasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Gambut

Juli Natalia Silalahi

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: julinataliasilalahi12@fisip.upr.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji persepsi politik perempuan Kalampangan terhadap kerusakan gambut serta bentuk eksklusi yang mereka alami dalam kebijakan pengelolaan gambut. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi dan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe, penelitian ini menelusuri pengalaman hidup perempuan terkait perubahan ekologis seperti banjir, kekeringan, dan risiko kebakaran yang dipicu oleh ekspansi kelapa sawit serta oleh kebijakan dan program pengelolaan gambut yang mengeksklusikan perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 19 informan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memaknai kerusakan gambut sebagai persoalan politik-ekologis yang dibentuk oleh relasi kuasa hegemonik antara aktor dominan, terutama perusahaan sawit dan elit lokal (pemerintah, pembuat proyek lingkungan, dan elit dominan dalam kegiatan perempuan di tingkat Kelurahan). Meskipun memiliki pengetahuan ekologis yang mendalam, perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi kebijakan strategis dan hanya terlibat dalam kegiatan domestik. Studi ini menyimpulkan bahwa demokrasi lokal belum menyediakan ruang agonistik bagi perempuan sebagai aktor politik yang sah. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola gambut yang inklusif dan responsif gender serta mengakui pengalaman dan pengetahuan perempuan.

Kata kunci: politik gambut; Perempuan; eksklusi politik; demokrasi agonistic; Mouffe; Kalampangan

Abstract:

This study examines the political perceptions of women in Kalampangan regarding peatland degradation and the forms of exclusion they experience within peatland governance policies. Using a qualitative phenomenological method and Chantal Mouffe's theory of agonistic democracy, this research explores women's lived experiences of ecological changes such as flooding, drought, and fire risks, which are driven by palm oil expansion as well as by policy and program designs that systematically exclude women. Data were collected through in-depth interviews with 19 female informants. The findings show that women interpret peatland degradation as a political-ecological issue shaped by hegemonic power relations involving dominant actors, particularly palm oil companies and local elites (government officials, environmental project implementers, and influential actors within Kelurahan-level women's organizations). Despite their extensive ecological knowledge and direct experiences, women are not included in strategic policy discussions and are only involved in domestic-oriented activities. The study concludes that local democracy has not yet provided an agonistic space that recognizes women as legitimate political actors. These findings highlight the urgent need for inclusive and gender-responsive peatland governance that acknowledges and incorporates women's experiences and knowledge.

Keywords: peatland politics; women; political exclusion; agonistic democracy; Mouffe; Kalampangan.

Corresponding: Juli Natalia Silalahi
E-mail: julinataliasilalahi12@fisip.upr.ac.id



PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis penting bagi stabilitas hidrologi, penyimpanan karbon, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya (Kumalawati et al., 2019; Masganti et al., 2020; Napitupulu & Mudiantoro, 2015; Prayoga, 2016). Indonesia memiliki luasan gambut terbesar di kawasan tropis, sehingga keberlanjutan ekosistem ini menjadi isu penting dalam tata kelola sumber daya alam nasional. Namun, dalam dua dekade terakhir, kerusakan gambut semakin

meningkat akibat ekspansi industri ekstraktif (seperti perkebunan kelapa sawit), praktik drainase berskala besar, serta kebijakan pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung ekologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem gambut memiliki keterkaitan erat dengan keputusan politik dan kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan (Susanti & Maryudi, 2021; Miettinen et al., 2017; Wijedasa et al., 2018).

Kerusakan gambut tidak hanya menimbulkan dampak ekologis berupa banjir, kekeringan ekstrem, maupun kebakaran lahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi Masyarakat (Elvince et al., 2021; F. Adji et al., 2020; Handayani, 2013; Marlina, 2017; Rachmanadi et al., 2018). Di wilayah Kelurahan, seperti Kalampangan, lahan gambut merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupan yang dikelola terutama oleh perempuan. Mereka berinteraksi langsung dengan gambut melalui aktivitas bertani, merawat tanaman, mengolah lahan, serta menjaga keberlanjutan rumah tangga yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan gambut. Perempuan di Kelurahan Kalampangan tidak banyak mendapatkan pengetahuan kuat tentang kondisi gambut dari buku ataupun program pemerintah, melainkan melalui pengalaman hidup sehari-hari sebagai petani, pengetahuan yang diturunkan dari orang tua, keluarga, dan tetangga.

Perempuan Kalampangan mengetahui bahwa gambut adalah tanah yang basah, hitam, mudah terbakar, dan rentan mengalami banjir. Pengetahuan mereka sangat erat dengan aktivitas bertani. Mereka tahu kapan tanah mulai kehilangan kesuburan, kapan kualitas air berubah, atau kapan risiko kebakaran meningkat. Mereka juga memahami bahwa gambut tidak dapat dikelola sembarangan, jika salah perlakuan, tanah bisa rusak dan sulit dipulihkan. Bahkan, informan perempuan menegaskan bahwa ladang di samping rumahnya yang tanahnya dominan gambut selalu banjir saat hujan dan sangat mudah terbakar saat kemarau. Menurutnya, kondisi ekstrem ini tidak hanya disebabkan alam, tetapi terkait dengan keberadaan perusahaan sawit di dekat wilayah mereka. Pembukaan lahan sawit menyebabkan tanah mengering lebih cepat dan saluran air berubah drastis. Ini menunjukkan bahwa perempuan memahami relasi antara keputusan ekonomi-politik dan kerusakan lingkungan.

Sebagian besar informan perempuan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar kebijakan pemerintah tentang pengelolaan lahan gambut secara resmi. Mereka tidak tahu ada program, aturan, ataupun mekanisme kelurahan atau pemerintah daerah terkait pengelolaan gambut. Meskipun begitu, mereka memahami kebijakan dari dampaknya. Misalnya, kebijakan larangan membakar lahan membuat mereka kesulitan mengelola tanah karena proses membuka lahan menjadi lebih berat dan mahal.

Di sisi lain, informan menyadari bahwa perusahaan besar, seperti perkebunan sawit, tidak menghadapi pembatasan seketat yang diterapkan pada petani kecil, yang mereka anggap sebagai ketidakadilan meskipun tidak secara langsung menyebutnya sebagai “politik”. Mereka memahami bahwa meskipun pembakaran lahan gambut dilarang pemerintah, alternatif konkret untuk mengatasi larangan tersebut belum ada. Beberapa informan mendapatkan informasi tentang pelatihan atau program pengelolaan gambut, namun program ini belum menjangkau perempuan secara merata dan bersifat sementara, tanpa pendampingan langsung di lapangan, terutama pasca bencana seperti banjir dan kebakaran. Meskipun perempuan memiliki

sensitivitas ekologis yang tinggi, pengetahuan mereka sering tidak diakui dalam pembuatan kebijakan formal. Perempuan, yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan gambut, mulai dari mempersiapkan lahan hingga mengontrol agar tidak terbakar, seringkali dieksklusi dalam partisipasi terkait kebijakan gambut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa degradasi gambut sering dipicu oleh ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan korporasi besar, seperti yang terjadi dengan perusahaan sawit di Kalimantan Tengah, yang mengubah aliran air dan meningkatkan risiko kebakaran gambut. Meskipun perempuan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang kerusakan gambut, ruang partisipasi mereka dalam kebijakan publik tetap terbatas.

Penelitian tentang partisipasi perempuan dalam kebijakan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan sering kali dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan dan hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, domestik, atau kegiatan komunitas yang tidak bersifat strategis (Siregar, 2020; Dwisatria & Pratiwi, 2022). Hal serupa terjadi di Kalampangan, di mana perempuan dilibatkan dalam kegiatan seperti pelatihan membuat jamu atau kegiatan PKK, tetapi tidak dalam musyawarah kebijakan gambut atau diskusi strategis mengenai pengelolaan lahan gambut. Bahkan, perempuan yang dilibatkan umumnya adalah elite sosial seperti pengurus PKK atau Karang Taruna, bukan petani perempuan yang terdampak langsung oleh kerusakan gambut. Perempuan dilibatkan pun sering berhubungan dengan membagikan pupuk atau memberikan arahan sesaat, bukan benar-benar melibatkan perempuan dalam merumuskan arah kebijakan.

Fenomena eksklusi perempuan dari ruang politik pengelolaan gambut menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam demokrasi lokal. Dalam konteks inilah pemikiran Chantal Mouffe menjadi relevan, terutama terkait bagaimana dominasi aktor tertentu dalam ruang publik menciptakan eksklusi politik terhadap kelompok marjinal yang sebenarnya memiliki pengalaman dan pengetahuan signifikan. Mouffe menekankan bahwa demokrasi tidak selalu inklusif dan sering kali menghasilkan hegemoni di mana kelompok tertentu memiliki kuasa menentukan arah kebijakan sementara kelompok lain dimarginalisasi. Situasi di Kalampangan mencerminkan kondisi tersebut, di mana perempuan memahami persoalan politik gambut secara mendalam, namun tidak diberikan akses untuk terlibat dalam proses kebijakan yang mengatur kehidupan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali persepsi politik perempuan Kalampangan terhadap kerusakan gambut serta menganalisis bagaimana mereka mengalami eksklusi dalam kebijakan pengelolaan gambut. Pendekatan ini penting dilakukan untuk membuka ruang wacana mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya pada ekosistem yang sangat rentan seperti gambut. Dengan memahami pengalaman, persepsi, dan posisi perempuan dalam dinamika kebijakan gambut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, khususnya perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup (*lived experience*) perempuan di Kelurahan Kalampangan terkait kerusakan gambut, perubahan ekologis, serta eksklusi mereka dalam kebijakan pengelolaan gambut. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dibentuk melalui pengalaman langsung, kesadaran, dan interpretasi informan terhadap fenomena politik-ekologis yang mereka hadapi sehari-hari. Fenomenologi berupaya mengungkap esensi pengalaman yang dialami perempuan secara mendalam dan reflektif tanpa memberikan intervensi atau perlakuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berdasarkan kerangka pemikiran Moustakas (1994). Pendekatan ini dipilih karena fenomenologi transendental berupaya menggali makna terdalam dari pengalaman hidup (*lived experience*) individu, termasuk bagaimana perempuan di Kelurahan Kalampangan memahami dan memaknai kerusakan gambut, perubahan ekologis, serta eksklusi mereka dalam kebijakan pengelolaan gambut. Moustakas (1994) menekankan pentingnya menggali kesadaran dan pengalaman subjektif sebagai dasar penyusunan esensi fenomena.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2024, di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Wilayah ini merupakan kawasan gambut tropis yang mengalami perubahan hidrologi signifikan akibat drainase, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, serta meningkatnya intensitas banjir dan kebakaran gambut. Kondisi ekologis tersebut berdampak langsung pada pengalaman perempuan yang beraktivitas di lahan gambut dan mengelola kebutuhan rumah tangga.

Informan penelitian berjumlah 19 perempuan. Usia informan berkisar antara 27 hingga 61 tahun dengan lama tinggal mulai delapan tahun hingga lebih dari enam puluh tahun. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai prinsip fenomenologi Moustakas (1994), yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kedalaman pengalaman terhadap fenomena yang diteliti. Teknik *purposive sampling* digunakan dengan kriteria: (1) perempuan yang menetap di Kalampangan minimal delapan tahun, (2) memiliki aktivitas langsung di lahan gambut seperti bertani atau berkebun, dan (3) mengalami atau menyaksikan dampak banjir, kekeringan, dan kebakaran gambut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*long interview*) sebagaimana dianjurkan oleh Moustakas (1994). Wawancara dilaksanakan secara terbuka dan reflektif, memberikan ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman hidup mereka secara bebas namun tetap dalam fokus fenomena. Instrumen utama penelitian terdiri atas pedoman wawancara fenomenologis dan catatan lapangan (*field notes*) serta alat perekam suara. Wawancara berfokus pada pengalaman ekologis, persepsi terhadap keberadaan perkebunan sawit, pemaknaan terhadap kerusakan gambut, serta pengalaman eksklusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan gambut.

Analisis data dilakukan menggunakan langkah-langkah fenomenologi transendental yang dikembangkan oleh Moustakas (1994). Tahapan pertama adalah *epoche* atau bracketing, yaitu proses penangguhan asumsi dan bias peneliti terhadap fenomena. Tahap kedua adalah horizontalisasi, yaitu memberikan perlakuan setara terhadap setiap pernyataan informan

sebelum dilakukan pengelompokan makna. Tahap ketiga adalah penyusunan *clusters of meaning* untuk menemukan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap akhir adalah penyusunan deskripsi tekstural dan struktural yang memuat apa yang dialami informan dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk, hingga menghasilkan esensi (*essence*) mengenai pengalaman perempuan terkait politik gambut dan eksklusi partisipasi dalam kebijakan pengelolaan gambut.

Validitas data dilakukan melalui prosedur verifikasi fenomenologis sebagaimana dijelaskan oleh Moustakas (1994), yaitu melalui konsistensi tema, refleksi mendalam peneliti, dan konfirmasi makna kepada informan (*member validation*) untuk memastikan hasil interpretasi tidak menyimpang dari pengalaman yang mereka sampaikan. Teknik ini bertujuan menjaga kredibilitas esensi fenomena yang direkonstruksi dari pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan kerangka teori demokrasi agonistik yang dikembangkan oleh Chantal Mouffe. Mouffe (2000; 2005; 2013) mengkritik tradisi demokrasi liberal yang menurutnya cenderung menyingkirkan konflik dan mengidealkan konsensus sebagai tujuan akhir politik. Bagi Mouffe, demokrasi selalu ditandai oleh relasi kuasa yang tidak seimbang serta pertarungan hegemonik antar-aktor yang berupaya mempertahankan atau menantang dominasi. Konflik tidak dapat dihapuskan, melainkan harus diartikulasikan secara sah dalam ruang publik melalui relasi agonistik, yaitu pertarungan politik antara pihak-pihak yang diakui keberadaannya sebagai bagian dari komunitas politik meskipun memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Demokrasi agonistik menolak gagasan bahwa ruang politik bersifat netral; sebaliknya, ruang tersebut selalu memuat eksklusi tertentu yang harus disadari sebagai bagian dari dinamika hegemoni.

Dalam konsep Mouffe, perbedaan antara musuh (*enemy*) dan lawan tanding (*adversary*) sangat penting dalam analisis demokrasi. Musuh adalah pihak yang dianggap tidak sah dan harus dieliminasi dari arena politik, sementara *adversary* adalah pihak yang diakui sebagai subjek politik sah meskipun berbeda kepentingan. Demokrasi agonistik menuntut ruang bagi kelompok marjinal untuk diakui sebagai *adversary* sehingga dapat mengartikulasikan aspirasi, menantang hegemoni, dan menawarkan wacana alternatif. Dalam konteks pengelolaan gambut di Kalampangan, teori ini menjelaskan bagaimana perempuan—yang memiliki pengalaman ekologis, pengetahuan lokal, serta kesadaran politik terkait hubungan antara sawit dan kerusakan gambut justru diposisikan sebagai “yang lain” (*the other*), sehingga suara mereka tidak dianggap sebagai bagian dari proses politik dan kebijakan publik. Dengan demikian, demokrasi lokal gagal menyediakan ruang agonistik di mana perempuan dapat tampil sebagai aktor politik yang sah.

Penelitian ini menghasilkan temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa perempuan di Kelurahan Kalampangan tidak hanya mengalami kerusakan gambut sebagai persoalan ekologis, tetapi juga memaknainya sebagai ketidakadilan politik yang lahir dari relasi kuasa tidak seimbang. Analisis ini menggunakan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe yang menjelaskan bahwa ruang demokrasi selalu diwarnai oleh dominasi aktor tertentu dan produksi

eksklusi terhadap kelompok marjinal. Dalam konteks Kalampangan, perempuan mengalami marginalisasi meskipun memiliki pengetahuan ekologis yang kuat mengenai gambut.

Informan Hesty menegaskan hubungan antara kerusakan gambut dan keberadaan perusahaan sawit: “kalau hujan ladang kami jadi banjir, kalau musim kemarau di wilayah ini bisa rawan kebakaran... oleh disekitar wilayah kami ini ada perusahaan sawit”. Kerusakan ekologis ini dipahami perempuan sebagai hasil keputusan politik dan ekonomi yang memprioritaskan kepentingan industri, bukan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan pemikiran Mouffe bahwa kebijakan publik seringkali mencerminkan kepentingan aktor hegemonik.

Informan Nahrita menguatkan pandangan tersebut dengan menyatakan: “alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit semakin mempersempit akses masyarakat terhadap lahan pertanian”. Dalam perspektif Mouffe, pengalihan lahan ini mencerminkan praktik hegemonik yang mendominasi ruang publik dan mempersempit ruang partisipasi kelompok rentan seperti perempuan petani gambut.

Pengalaman ekologis informan menggambarkan kedalaman pengetahuan perempuan mengenai gambut. Informan Sutini menjelaskan: “tantangan utama dari tanah gambut ini salah satunya bersifat asam... saat musim kemarau harus waspada kebakaran, dan kalau musim hujan bisa banjir... tanaman akan busuk”. Informan Sri Rahayu menambahkan bahwa “lahan gambut dapat rusak saat musim hujan atau banjir, menyebabkan kegagalan panen”. Informan Wahyutri juga menegaskan bahwa banjir “mengurangi hasil panen dan mengancam ketahanan pangan keluarga”. Meskipun demikian, pengetahuan ekologis ini tidak memperoleh legitimasi politik.

Pengetahuan ekologis perempuan ini selaras dengan temuan penelitian mengenai kerentanan gambut tropis terhadap perubahan tata air dan ekspansi komoditas ekstraktif yang dikemukakan oleh Graham et al. (2017) dan Wijedasa et al. (2018). Namun, sebagaimana dikemukakan Swyngedouw (2011), politik lingkungan sering kali dikemas dalam bahasa teknokratis yang menutupi relasi kuasa di baliknya. Di Kalampangan, kerusakan gambut sering dibicarakan sebagai persoalan teknis pengelolaan lahan, seperti kurangnya kanal air, rendahnya kapasitas petani, atau perlunya penyuluhan, padahal bagi perempuan, persoalan tersebut jelas terkait dengan dominasi aktor ekonomi dan politik yang menentukan perubahan lanskap tanpa mempertimbangkan suara masyarakat kecil. Dengan kata lain, isu ekologis yang mereka hadapi sehari-hari sesungguhnya berada di dalam ruang politik yang lebih luas, di mana keputusan-keputusan strategis mengenai tata ruang, perkebunan sawit, dan distribusi sumber daya dilakukan secara eksklusif dan hegemonik. Perspektif Mouffe membantu mengungkapkan bahwa depolitisasi isu gambut justru memperkuat hegemoni aktor dominan, sekaligus membungkam konflik yang seharusnya diartikulasikan secara agonistik oleh kelompok yang terdampak seperti perempuan Kalampangan.

Chantal Mouffe menekankan bahwa eksklusi politik terjadi ketika suara kelompok tertentu tidak dianggap sebagai bagian sah dari ruang politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Kalampangan mengalami hal tersebut. Informan Wahyutri menyatakan: “Belum ada program atau dukungan yang memadai untuk mendorong perempuan lebih terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan gambut”. Informan Sunarti menambahkan: “kebijakan saat ini masih belum menjangkau kebutuhan masyarakat kecil seperti dirinya”. Hal

ini menggambarkan adanya pemisahan antara ruang formal pengambilan keputusan dan pengalaman perempuan yang terdampak langsung.

Informan Mesrani menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan gambut: “perempuan sangatlah penting... lebih teliti, tulen, dan rapih dalam mengelola lahan gambut... tetapi tidak pernah mendapatkan pelatihan”. Hal ini menunjukkan apa yang disebut Mouffe sebagai ‘delegitimasi pengetahuan’, yaitu ketika pengetahuan kelompok tertentu tidak diakui dalam struktur kebijakan hegemonik.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pelibatan perempuan masih bersifat domestik dan tidak strategis. Informan Sariyem mengatakan: “Yang sering itu kegiatan buat jamu, saya sering ikut”. Informan Waginah dan Asmini, Amsiah, Sutini mengungkapkan hal serupa bahwa pelatihan yang mereka ikuti sebagian besar adalah pelatihan jamu. Sementara itu, pelatihan strategis seperti pengelolaan gambut hanya diberikan kepada aktor elit lokal seperti PKK atau karang taruna. Informan Hesty menyebut: “gak pernah diajak pelatihan gambut... biasanya yang ikut ya itu-itu aja orangnya, PKK dan Karang Taruna”.

Dalam perspektif Mouffe, fenomena ini merupakan bentuk ‘domestikasi partisipasi’, yakni kondisi ketika perempuan hanya dilibatkan dalam ruang-ruang non-strategis yang tidak mengancam struktur kekuasaan. Akibatnya, suara perempuan tidak pernah masuk ke arena agonistik, yaitu ruang kontestasi politik yang seharusnya memungkinkan mereka mengartikulasikan kepentingannya sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan gambut. Dengan demikian, esensi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Kalampangan memaknai kerusakan gambut sebagai fenomena politik-ekologis yang berkaitan erat dengan relasi hegemonik antara negara, perusahaan sawit, dan elit lokal. Namun struktur demokrasi lokal gagal menyediakan ruang agonistik di mana perempuan dapat menantang dominasi tersebut. Sesuai teori Mouffe, tanpa ruang agonistik, demokrasi hanya berfungsi sebagai arena hegemonik yang meminggirkan kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan petani gambut.

Tabel 1. Tema-tema Analitis Berdasarkan Teori Demokrasi Agonistik Chantal Mouffe

No	Tema	Bukti Empiris
1	Kerusakan Ekologis sebagai Produk Politik	“ladang kami jadi banjir... ada perusahaan sawit”
2	Hegemoni Aktor Dominan	“alih fungsi lahan sawit mempersempit akses ke lahan pertanian”
3	Eksklusi Politik Perempuan	“belum ada program yang melibatkan perempuan”
4	Domestikasi Partisipasi	“yang sering itu kegiatan jamu”
5	Delegitimasi Pengetahuan Perempuan	“perempuan lebih teliti mengelola lahan gambut”

Sumber : Olahan Peneliti

Tabel 1 memperlihatkan lima tema utama hasil analisis penelitian berdasarkan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe, yang menekankan adanya relasi kuasa hegemonik dalam ruang demokrasi lokal. Tema pertama, yaitu *kerusakan ekologis sebagai produk politik*, menunjukkan bahwa perempuan Kalampangan memahami banjir, kekeringan, dan kebakaran gambut bukan hanya sebagai persoalan alamiah, tetapi sebagai akibat keputusan politik yang menguntungkan perusahaan sawit. Hal ini tampak dalam pernyataan informan hesty : “ladang

kami jadi banjir... ada perusahaan sawit”, yang menegaskan bahwa kerusakan ekologis dipahami sebagai konsekuensi dari intervensi aktor dominan. Tema kedua, *hegemoni aktor dominan*, menunjukkan bahwa alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit mempersempit akses masyarakat terhadap lahan, sebagaimana disampaikan informan Nahrira: “alih fungsi lahan menjadi sawit mempersempit akses ke lahan pertanian”. Temuan ini mengonfirmasi bahwa perusahaan sawit dan elit lokal membentuk hegemoni yang menentukan arah kebijakan pengelolaan gambut.

Tema ketiga, *eksklusi politik perempuan*, menggambarkan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam kebijakan meskipun mereka menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan gambut. Hal ini tampak dari pernyataan Wahyutri : “belum ada program yang melibatkan perempuan”. Tema keempat, *domestikasi partisipasi*, menunjukkan bahwa ruang partisipasi perempuan dibatasi pada kegiatan domestik seperti pelatihan membuat jamu, yang “sering itu kegiatan jamu” (informan Sariyem). Pelibatan seperti ini menunjukkan bahwa peran perempuan sengaja diarahkan ke ranah non-strategis sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan lingkungan. Tema kelima, *delegitimasi pengetahuan perempuan*, menggambarkan bagaimana pengetahuan ekologis perempuan, misalnya ketelitian dan pengalaman mereka mengelola lahan tidak diakui sebagai sumber otoritatif, sebagaimana ungkapan: “perempuan lebih teliti mengelola lahan...” (Informan **Mesrani**). Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bagaimana perempuan Kalampangan berada dalam posisi yang dimarginalkan secara politik meskipun memiliki kompetensi ekologis dan pemahaman politik-ekologis yang kuat. Temuan ini sejalan dengan analisis Mouffe bahwa demokrasi selalu menghasilkan eksklusi, dan kelompok marginal seperti perempuan tetap berada di luar arena agonistik yang seharusnya mengakui mereka sebagai aktor politik sah.



Gambar 1. Model Agonistik Relasi Kuasa dalam Politik Gambut Kalampangan

Sumber : Olahan peneliti

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan gambut di Kalampangan berlangsung dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Aktor dominan, seperti perusahaan sawit dan elit lokal memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan praktik pengelolaan gambut.

Kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kepentingan modal, bukan pada kebutuhan ekologis atau kehidupan masyarakat. Dalam perspektif demokrasi agonistik Chantal Mouffe, situasi ini mencerminkan adanya hegemoni politik, di mana kepentingan kelompok kuat dipresentasikan sebagai keputusan “netral” atau “teknis”, padahal sesungguhnya mengandung muatan konflik kepentingan yang tidak diakui secara terbuka.

Perempuan Kalampangan, yang memiliki pengalaman langsung terhadap kerusakan gambut seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran, berada dalam posisi paling terdampak tetapi justru terkeklusi dari proses pengambilan kebijakan. Pengetahuan lokal dan pemahaman politik-ekologis mereka tidak masuk dalam arena politik karena struktur demokrasi lokal tidak menyediakan ruang agonistik yang mengakui mereka sebagai *adversary* yang sah. Akibatnya, partisipasi perempuan dibatasi pada kegiatan domestik yang tidak mempengaruhi keputusan strategis. Hubungan dalam gambar ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis dan eksklusi perempuan bukan fenomena terpisah, melainkan produk dari dominasi aktor tertentu dan absennya ruang kontestasi politik yang inklusif.



Gambar 2. Foto Bersama Informan Hesty dan ladangnya terkena banjir

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar yang menampilkan Informan Hesty berdiri di area ladang yang tergenang banjir menggambarkan secara visual dampak ekologis dari perubahan hidrologi gambut di Kalampangan. Genangan air pada lahan pertanian menunjukkan bagaimana tanah gambut kehilangan kemampuan alami untuk menyerap dan menahan air akibat modifikasi lanskap di sekitar wilayah tersebut. Dalam penjelasannya, Hesty menyebut bahwa banjir yang terjadi bukan hanya akibat curah hujan, tetapi karena keberadaan perusahaan sawit di sekitar permukiman mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan industri sawit, termasuk pembuatan kanal dan pengeringan gambut, telah mengganggu keseimbangan hidrologis dan meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Dengan demikian, gambar ini berfungsi sebagai

bukti visual bahwa kerusakan ekologis bukan hanya fenomena alam, tetapi merupakan hasil intervensi perusahaan sawit yang membentuk kondisi lingkungan rusak secara drastis.

Dalam perspektif demokrasi agonistik Chantal Mouffe, gambar tersebut merepresentasikan bagaimana kerusakan ekologis yang dialami perempuan seperti Hesty sesungguhnya berada dalam medan politik yang dipenuhi relasi kuasa. Meskipun Hesty memiliki pengetahuan langsung mengenai penyebab banjir dan mampu mengidentifikasi hubungan antara sawit dan kerusakan gambut, suaranya tidak masuk ke dalam arena kebijakan. Gambar ini secara simbolik menunjukkan posisi perempuan sebagai pihak yang terdampak paling berat tetapi tetap berada di luar struktur pengambilan keputusan. Kondisi banjir di ladang Hesty tidak hanya memvisualisasikan degradasi lingkungan, tetapi juga memvisualisasikan eksklusi politik, yaitu perempuan memiliki pengalaman dan pemahaman ekologis yang kuat, namun tidak diberi ruang untuk menjadi *adversary* yang sah dalam proses demokrasi lokal. Dengan demikian, foto ini bukan hanya dokumentasi kondisi lapangan, tetapi juga bukti bagaimana hegemoni aktor dominan seperti perusahaan sawit dan elit lokal (pemerintah, pembuat proyek lingkungan, dan elit dominan kegiatan perempuan di tingkat Kelurahan) membungkam konflik ekologis yang seharusnya diartikulasikan secara agonistik oleh masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kerusakan gambut yang dialami perempuan Kalampangan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi merupakan manifestasi dari struktur kuasa yang timpang dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan menyadari dengan jelas hubungan antara ekspansi sawit, perubahan hidrologi gambut, dan meningkatnya risiko banjir maupun kebakaran. Namun, pengalaman dan pengetahuan ekologis tersebut tidak diakui sebagai dasar pengambilan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi lokal belum mampu menjadi arena agonistik yang mengakui perempuan sebagai subjek politik yang sah. Sebaliknya, kebijakan lingkungan justru memperkuat dominasi aktor tertentu yang meminggirkan suara perempuan dalam urusan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.

Temuan ini menguatkan argumen Mouffe bahwa demokrasi selalu mengandung eksklusi, dan perubahan hanya mungkin terjadi apabila kelompok yang diabaikan mampu memasuki ruang kontestasi politik sebagai *adversary* yang diakui. Dalam konteks Kalampangan, perempuan memiliki kapasitas epistemik dan pengalaman ekologis yang relevan dan dalam tentang gambut dari pengalaman sehari-hari mereka hidup Bersama gambut dengan waktu yang sangat lama, namun belum memperoleh ruang untuk mengartikulasikan konflik ekologis-politik yang mereka hadapi. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan pentingnya membuka ruang deliberatif yang lebih inklusif dan agonistik dalam kebijakan pengelolaan gambut. Implementasi kebijakan berbasis kesetaraan gender dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal perempuan serta partisipasi penuh perempuan dalam pengelolaan gambut ditingkat kebijakan merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap kondisi masyarakat yang paling terdampak.

KESIMPULAN

Perempuan Kalimantan memahami kerusakan gambut sebagai masalah politik-ekologis yang terkait dengan ekspansi perkebunan sawit, perubahan tata air, dan meningkatnya kejadian banjir serta kekeringan, yang mereka alami langsung dalam pengelolaan lahan gambut. Meskipun terdampak paling besar, mereka mengalami eksklusi dalam proses kebijakan pengelolaan gambut, dengan keterlibatan terbatas pada kegiatan domestik sementara ruang pengambilan keputusan strategis hanya diberikan kepada elit lokal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur demokrasi lokal belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk diakui sebagai aktor politik. Dominasi perusahaan sawit dan elit lokal memperkuat hegemoni politik yang menyingkirkan suara perempuan, dengan isu kerusakan gambut direduksi menjadi masalah teknis, padahal perempuan memandangnya sebagai bagian dari konflik ekologis-politik yang lebih luas. Berdasarkan temuan ini, pengembangan penelitian dapat diarahkan pada model partisipasi perempuan berbasis demokrasi agonistik, penelitian komparatif di wilayah gambut lain di Kalimantan dan Sumatra, serta penyusunan kebijakan responsif gender yang mengintegrasikan pengetahuan ekologis perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvince, R., Joni, H., Yuanita, I., & Sosilawaty. (2021). Program pemulihan ekosistem gambut untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5).
- F. Adji, F., Sosilawaty, Darung, U., Nidya, Malina Silva, K., Khairunnisa, & Fernandes. (2020). Implementasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program Bina Desa Mandiri Peduli Gambut di kawasan Eks PLG Sejuta Hektar Provinsi Kalimantan Tengah. *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.52850/jpmupr.v7i2.2082>
- Handayani, I. G. A. K. R. (2013). Urgensi peraturan daerah pengelolaan daerah aliran Sungai Bengawan Solo dalam rangka penguatan fungsi lingkungan hidup dan good governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art5>
- Kumalawati, R., Anjarini, D., & Elisabeth. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP*.
- Marlina, S. (2017). Pengelolaan ekosistem gambut pasca kebakaran lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(1). <https://doi.org/10.33084/mitl.v2i1.129>
- Masganti, M., Anwar, K., & Susanti, M. A. (2020). Potensi dan pemanfaatan lahan gambut dangkal untuk pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 11(1). <https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.43-52>
- Napitupulu, S., & Mudiantoro, B. (2015). Pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut yang berkelanjutan. *Annual Civil Engineering Seminar*.

- Prayoga, K. (2016). Pengelolaan lahan gambut berbasis kearifan lokal di Pulau Kalimantan. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah*, 3.
- Rachmanadi, D., Faridah, E., Sumardi, S., & van der Meer, P. (2018). Karakteristik kerusakan hutan rawa gambut tropis terdegradasi di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2). <https://doi.org/10.20527/jht.v5i2.4363>
- Dwisatria, A., & Pratiwi, H. (2022). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup di tingkat lokal. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(1), 45–62.
- Graham, L. L. B., Page, S. E., & Tristisari, Y. (2017). Drainage and land-use impacts on tropical peatland hydrology: A review. *Environmental Reviews*, 25(2), 199–213.
- Miettinen, J., Shi, C., & Liew, S. C. (2017). Fire distribution in Southeast Asian peatlands. *Global Ecology and Conservation*, 9, 70–78.
- Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. Verso.
- Mouffe, C. (2005). *On the political*. Routledge.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the world politically*. Verso.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Siregar, E. (2020). Representasi perempuan dalam kebijakan lingkungan hidup: Analisis gender dan politik lokal. *Jurnal Politik*, 6(2), 198–212.
- Susanti, A., & Maryudi, A. (2021). The dynamics of peatland policy in Indonesia: Power contestation, forest governance, and policy outcomes. *Forest and Society*, 5(1), 152–167.
- Swyngedouw, E. (2011). Depoliticized environments: The end of nature, climate change and the post-political condition. *Royal Institute of Technology*.
- Wijedasa, L. S., Sloan, S., Page, S. E., Evans, T., & Clements, G. R. (2018). Deforestation and degradation of tropical peatlands. *Conservation Letters*, 11(2), e12410.